

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu Negara berkembang yang tengah terjadi masa peralihan yang mulanya hanyalah mengutamakan ekonomi pada sektor agraris sekarang mulai berkembang melalui sector industri. Disamping itu tahun 2017 Indonesia termasuk pula Negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia, yakni sebanyak 257.912.349 jiwa (<https://tumoutounews.com>). Dengan jumlah penduduk inilah mulai memunculkan beberapa permasalahan, terkhusus pada permasalahan dalam bidang sosial maupun ekonomi, yakni kemiskinan serta pengangguran dimana jumlah penduduk yang sangat banyak namun tidak diiringi dengan pemenuhan kebutuhan pokok warga serta lapangan pekerjaan yang cukup. Kemiskinan maupun pengangguran adalah permasalahan perekonomian pula yang kompleks atau sulit diselesaikan yang dikarenakan berbagai factor yang saling berhubungan misalnya perkembangan perekonomian (Sukirno, 2011), tingkat pendidikan (hasil penelitian Joko Suprayitno, dkk pada tahun 2015), angkatan kerja, upah (Kaufman dkk dalam Pujoalwanto, 2014) yang bisa memberi akibat negatif pada politik, social, perekonomian.

Kondisi derajat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tahun 2018 menunjukkan menurun. Persentase masyarakat miskin di tahun 2018 sejumlah 9,66 persen mengalami penurunan 0,46 persen poin bulan

September 2017. Hal tersebut ditunjang dengan bahan pangan yang terjaga, bangunan ataupun gaji buruh tani yang mengalami peningkatan, dan ada bantuan beras serta PKH ([https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/15214516/bps-penduduk miskin-turun](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/15214516/bps-penduduk%20miskin-turun)).

Dalam tahun 2017 – 2018, pengangguran mengalami penurunan empat puluh ribu individu, sesuai berdasarkan TPT yang mengalami penurunan menjadi 5,34% tahun 2018. Di lihat berdasarkan tingkat pendidikan, TPT bagi SMK masih dominan antara tingkat pendidikan lainnya, sebanyak 11,24%. Penurunan dikarenakan oleh terjadinya penambahan presentase penduduk yang bekerja di sector industry, perdagangan maupun jasa kemasyarakatan(<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/06/153940126>).

TABEL 1. 1

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Periode 2010-2018

Tahun	TPT (%)	Tingkat Kemiskinan (%)
2010	7,14	13,33
2011	6,56	12,49
2012	6,14	11,66
2013	6,25	11,47
2014	5,94	10,96
2015	6,18	11,13
2016	5,61	10,70
2017	5,5	10,12
2018	5,34	9,66

Sumber: BPS (2018), data diolah

Derajat pengangguran di Indonesia tiap tahun menurun, namun naik di tahun 2015. Kenaikan ini dikarenakan perekonomian yang melambat

dimana perusahaan menurunkan tarif produksi dengan melakukan PHK ataupun peningkatan pekerja yang tidak diimbangi dengan adanya penyerapan pekerja yang benar dalam sector industry. Derajat kemiskinan di Indonesia yang setiap tahun menurun pula, selain pada tahun 2015 yang naik yang dikarenakan besarnya tingkat laju inflasi, terus meningkatnya rerata harga beras secara nasional, harga eceran barang komoditi kecuali beras mengalami peningkatan, gaji buruh tani yang per harinya menurun (<https://www.antaraneews.com>).

Walaupun derajat kemiskinan maupun pengangguran di Indonesia menurun di tahun 2018, namun permasalahan kemiskinan dan pengangguran masih sebagai pusat perhatian di beberapa provinsi yang terdapat pada Pulau Jawa seperti Provinsi Banten memiliki TPT sebanyak 8,52% sedangkan pada Provinsi Jabar memiliki TPT sebanyak 8,17% yang mempunyai derajat pengangguran yang relative cukuplah tinggi di tahun yang sama. Sementara jumlah warga miskin yang terdapat pada Pulau Jawa masih memberikan kontribusi tertinggi bagi penambahan tingkat kemiskinan di Indonesia tinggi. Sementara jumlah warga miskin di Pulau Jawa masih memberikan kontribusi tertinggi guna penambahan pada derajat kemiskinan di Indonesia.

Pulau Jawa mempunyai sejumlah provinsi yang memiliki tingkat pengangguran yang beragam. Untuk beberapa provinsi yang tingkat penganggurannya besar, permasalahan pengangguran ialah permasalahan yang haruslah di atas secara tepat dan benar supaya bisa menurun pada

derajat pengangguran. Untuk provinsi yang tingkat penganggurannya kecil permasalahan pengangguran masih menjadi permasalahan yang haruslah ditangani dengan segera, dengan hal inilah dapat dilaksanakan guna mengantisipasi bertambahnya derajat pengangguran. Misal provinsi Jabar yang mempunyai derajat pengangguran kecil pada Pulau Jarim yang mempunyai derajat pengangguran rendah pada Pulau Jawa namun masih terus berupaya menurunkan derajat pengangguran dengan melaksanakan sertifikasi para pekerja, program pelatihan ketrampilan, kegiatan pemagangan, dan peningkatan kompetensi (<https://www.merdeka.com>). Sama pula di DIY, yang berdasar data BPS tingkat pengangguran di DIY di tahun 2018 masuk kategori paling rendah secara nasional, yakni masuk posisi nomor 6 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki TPT sejumlah 3,35%. Walaupun secara nasional pengangguran di DIY sesungguhnya meningkat yakni dari 3.02% tanggal Agustus 2017 menjadi 3,35% bulan Agustus 2017 (BPS, 2018). Bertambahnya derajat pengangguran di DIY dikarenakan terdapatnya warga yang sudah menyelesaikan pendidikan selama satu tahun terakhir tetapi masih belum terserap banyak dalam pasar kerja, disamping itu terdapatnya warga umur lima belas tahun ke atas yang pernah bekerja di lapangan bisnis industry pengolahan konstruksi, menyediakan minuman ataupun pedagang eceran yang belum memperoleh pekerjaan lagi. Guna menyelesaikan hal itu pemerintah sudah melaksanakan berbagai cara guna menurunkan derajat pengangguran misla

melaksanakan peningkatan kemampuan, melaksanakan pelatihan, pemagangan ataupun melakukan kerja sama dengan perusahaan luar DIY.

Tingkat pengangguran DIY periode 2018 bila dilakukan perbandingan dengan sejumlah provinsi di Pulau Jawa tergolong yang paling rendah yakni sebanyak 3,35% sedangkan tingkat pengangguran yang paling tinggi ada di Provinsi Banten yakni sejumlah 8,52%. Provinsi Jatim dan Jateng mempunyai tingkat pengangguran yang hamper sama dengan provinsi DIY yakni ada pada rentang empat persen. Derajat pengangguran pada DIY dari periode 2010-2012 menurun tetapi pada tahun 2013 naik sedangkan di tahun 2014-2016 cenderung menurun dan meningkat ditahun 2017-2018. Kenaikan ini muncul dikarenakan jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan, yang dimana banyak anak berusia sekolah yang tidak meneruskan sekolah ke tingkat lebih tinggi maupun belum bisa terserap ke pasar kerja.

TABEL 1. 2

Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2010-2018

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)
2010	5,69
2011	3,97
2012	3,90
2013	6,01
2014	5,68
2015	4,07
2016	2,72
2017	3,02
2018	3,35

Sumber: BPS (2018), data diolah

Variabel yang memberikan pengaruh pada tingkat pengangguran salah satunya yakni tingkat pendidikan dimana pendidikan karyawan sangatlah memberi pengaruh pada tingkat pengangguran, maka guna memperoleh pekerjaan diperlukan keahlian ataupun pendidikan dari calon karyawan supaya dapat terserap di dunia kerja (Joko Suprayitno dkk, 2016). Tingkat pendidikan di DIY bisa diamati berdasarkan AMH. AMH merupakan proporsi warga berusia lima belas tahun ke atas yang mempunyai potensi menulis atau membaca huruf latin. Angka melek huruf di DIY di periode 2010-2018 selalu mengalami peningkatan yakni di tahun 2010 AMH sejumlah 90,18% dan tahun 2015 sudah mencapai 94,5%. Tetapi AMH DIY masih tergolong rendah daripada sejumlah provinsi di Pula Jawa misalnya Banten, Jabar, ataupun DKI Jakarta.

TABEL 1. 3

Tingkat Angka Melek Huruf di DIY Tahun 2010-2018

Tahun	Angka Melek Huruf (Persen)
2010	90,84
2011	91,49
2012	92,02
2013	92,82
2014	94,44
2015	94,50
2016	94,59
2017	94,64
2018	94,83

Sumber: BPS (2018), data diolah

Jika jumlah Melek Huruf pada DIY selalu meningkat harusnya banyak angkatan kerja yang telah mempunyai modal keterampilan ataupun wawasan guna diserap lapangan pekerjaan. Tetapi yang masih sebagai

permasalahan di DIY yakni banyak lulusan sekolah namun lapangan kerja memiliki kecenderungan konstan ataupun mengalami pengurangan. Disamping itu potensi perusahaan dalam DIY bisa menyerap pekerja yang tidak terlalu tinggi pula, maka memunculkan kompetisi ketat dalam proses mencari pekerjaan yang aman dapat sebagai pemicu adanya pengangguran (Kaufman dkk dalam Pujoalwanto, 2014). DIY mempunyai derajat partisipasi angkatan kerja dari periode 2010-2018 yang yang terjadi kenaikan penurunan, yang mana di tahun 2010 TPAK sejumlah 69,76% serta tahun 2018 TPAK sejumlah 73,37%. Daripada provinsi lainnya di Pulau Jawa TPAK DIY merupakan yang paling tinggi, artinya besarnya pasokan pekerja yang ada guna menghasilkan jasa maupun barang pada ekonomi yang cukuplah tinggi daripada provinsi lainnya. TPAK pada DIY lebih besar dibandingkan DKI Jakarta sebanyak 63,95% maupun Jabar sebanyak 62,92% yang disebut dengan pusat perekonomian ataupun industry di tahun 2018.

TABEL 1. 4

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2018

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (Persen)
2010	69,76
2011	68,77
2012	70,85
2013	69,29
2014	71,05
2015	63,38
2016	71,96
2017	71,52
2018	73,37

Sumber: BPS (2018), data diolah

Pasokan angkatan kerja yang tinggi yang terdapat di DIY bila bisa didayagunakan ataupun dikelola dengan seoptimal mungkin akan memunculkan penambah produksi yang nanti akan bermuara kepada pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian merupakan proses naiknya jumlah produksi sebuah ekonomi yang dicapai pada bentuk naiknya pendapatan nasional. disamping itu pertumbuhan perekonomian termasuk pula indikasi kesuksesan pembangunan perekonomian (Pujoalwanto, 2014). Sesuai pemaparan Mankiw pada konsep dasar perekonomian makro indikator yang dipakai untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian yaitu pertumbuhan PDRB. Berdasar data melalui BPS pertumbuhan perekonomian di DIY periode 2010-2013 senantiasa naik, selain pada tahun 2014 maupun 2015 yang menurun. Penurunan dikarenakan sisi produksi, dimana terdapat penurunan dikarenakan dampak musiman dalam lapangan usaha kehutanan, pertanian, maupun perikanan terkhusus sub kategori tanaman pangan. Disamping itu terdapat perkembangan negative dalam lapangan usaha yang berkontribusi besar pada PDRB, misalnya perdagangan eceran, besar, reparasi mobil dan menyediakan akomodasi, perusahaan makanan serta minuman (<http://koran-sindo.com>). Pertumbuhan perekonomian di DIY tahun 2018 bila dilakukan perbandingan dengan sejumlah provinsi di Pulau adalah tertinggi yakni sebanyak 7,39%. Sementara pertumbuhan ekonomi paling tinggi ada di DKI Jakarta yakni sebanyak 6,17%, Jawa

Barat sejumlah 5,64%, Jawa Tengah sejumlah 5,25%, dan Jawa Timur sejumlah 5,50%.

TABEL 1. 5

Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta (Persen), 2010-2018

Tahun	PDRB (Persen)
2010	3,84
2011	8,45
2012	5,71
2013	5,40
2014	5,57
2015	5,50
2016	4,78
2017	5,26
2018	7,39

Sumber: BPS (2018), data diolah

Disamping tingkat pendidikan, pertumbuhan perekonomian, serta angkatan kerja yang dijadikan variable penyebab pengangguran, efisiensi upah maupun kekakuan upah dapat pula dijadikan penyebab pengangguran (Kaufman dkk dalam Pujoalwanto, 2014). Upah merupakan uang yang umumnya diterima buruh sesudah merampungkan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Penetapan upah setiap wilayah tidak sama yang didasarkan kepada KHL daerah yang terkait dan mempertimbangkan pertumbuhan maupun produktivitas perekonomian sebuah wilayah. Jenis upah yang saat ini banyak dipergunakan yakni Upah Minimum dimana termasuk upah bulanan paling rendah yang mencakup upah pokok salah satunya tunjangan tetapi. Di tahun 2013 DIY mempergunakan UMK yang dijadikan system pengupahan.

Mengacu data tahun 2010-2018 upah minimum yang ditentukan pemerintah DIY menunjukkan meningkat yang cukuplah tinggi. Di tahun 2010, UPM Provinsi yang ditentukan sebanyak Rp. 745.695 per bulannya, serta setiap tahunnya upah selalu meningkat. Di tahun 2018 upah sudah meraih Rp. 1.454.154 per bulan. Pada tahun 2018, Bila dilakukan perbandingan dengan Provinsi di Pulau Jawa upah minimum pada DIY adalah yang paling rendah, sementara upah minimum yang paling tinggi ada di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak Rp 3.648.035 per bulannya. Hal tersebut dikarenakan KHL di DKI Jakarta lebih tinggi daripada KHL di DIY.

TABEL 1. 6

Upah Minimum Regional D.I. Yogyakarta (Rupiah), 2010-2018

Tahun	UMR (Rupiah)
2010	745.695
2011	808.000
2012	892.660
2013	947.114
2014	988.500
2015	988.500
2016	1.318.614
2017	1.337.645
2018	1.454.154

Sumber: BPS (2018), data diolah

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dilihat walaupun DIY masuk sebagai provinsi yang mempunyai tingkat pengangguran paling rendah secara nasional namun pada DIY di tahun 2018 tingkat pengangguran naik, demikian pula pada kurun 9 tahun dari periode 2010-2018 derajat pengangguran di DIY yang mulanya selalu menurun namun naik lagi.

Keadaan ini yang menunjukkan bahwasanya tingkat pengangguran di DIY sesungguhnya masih dijadikan pusat perhatian. Sejumlah variabel misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, upah minimum, angkatan kerja pada penelitian terdahulu menyebutkan pengaruh antar variabel itu pada derajat pengangguran di sejumlah wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, penulis berminat guna melaksanakan penelitian apakah berbagai variabel misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, upah minimum, maupun angkatan kerja akan memberikan pengaruh pula pada tingkat pengangguran dalam DIY periode 2010-2018.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang maupun batasan masalah, sehingga rumusan masalah pada penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018?
3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018?
4. Bagaimana pengaruh upah minimum pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yakni:

1. Memahami adanya pengaruh tingkat pendidikan pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018.
2. Memahami adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018.
3. Memahami adanya pengaruh angkatan kerja pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018.
4. Memahami terdapatnya pengaruh upah minimum pada tingkat pengangguran di DIY periode 2010-2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat yaitu :

1. Manfaat Bidang Teoritis.

Penelitian ini membantu menjelaskan gambaran kerangka teoritis hubungan antara pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, upah minimum secara simultan pada tingkat pengangguran di DIY Periode 2010-2018. Penelitian juga memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dalam memberikan literatur tambahan dalam ilmu ekonomi

2. Manfaat Bidang Praktik.

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum dengan bersamaan pada tingkat pengangguran di DIY Tahun 2010-2018

3. Manfaat untuk Pengambilan Kebijakan

Penelitian ini memberikan manfaat untuk pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengambilan keputusan ekonomi khususnya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, upah minimum dengan bersamaan pada tingkat pengangguran